

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Wilayah

Dalam Undang-Undang nomor 26 tahun, 2007 tentang penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasa wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan infrastruktur, manusia serta bantuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Menurut Saefulhakim (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perwilayahan penyusunan wilayah adalah pendelinesian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi antara yang satu dengan yang lainnya. Wilayah pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/*development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kunci, yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penguatan keterkaitan, (3)

keberimbangan, (4) kemandirian, dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Dalam membahas perencanaan wilayah, perencanaan berhadapan dengan pertanyaan apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya, dengan demikian, pilihan-pilihan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan terdiri atas tiga tahap, yang pertama adalah pemilihan tujuan dan kriteria, yang kedua adalah identifikasi dari alternatif yang sejalan dengan tujuan tersebut, dan yang ketiga adalah pemilihan pedoman dari tindakan menuju tujuan tersebut (Nurzaman, 2012). Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah pemilihan tindakan untuk masa depan yang sesuai dengan keinginan kita.

Perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai masalah sosial dan ekonomi. Perencanaan berorientasi ke masa depan, sangat memikirkan hubungan antar tujuan dengan keputusan bersama dan mengusahakan kekomprehensifan di dalam kebijakan dan program (Nurzaman, 2012).

Lebih rinci lagi, mengadopsi definisi operasional perencanaan yang didefinisikan, *Planning in the public domain*, perencanaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan tahapan berikut :

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan yang akan diintervensi.
2. Memodelkan dan menganalisis situasi dan kondisi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan.

3. Merancang satu atau lebih alternatif solusi yang potensial, baik dalam bentuk kebijakan, rencana substantif, rencana tindak, inovasi institusional, metode mobilitas sosial, dan lain-lain. Alternatif-alternatif solusi ini biasanya mempunyai karakter sebagai berikut :
 - a. Futuristik : spesifikasi tujuan dan sasaran, termasuk juga peramalan kondisi masa depan, penilaian probabilitas, skenario tahapan-tahapan kejadian yang akan terjadi, dan lain-lain.
 - b. Ruang : lokasi, struktur spasial, desain fisik, dan lain-lain.
 - c. *Resource requirements* : perkiraan biaya dan kebutuhan lainnya atas sumber daya langka, seperti *foreign exchange*, tenaga kerja ahli, dan lain-lain.
 - d. Prosedur pengimplementasian alternatif solusi tersebut.
 - e. Prosedur untuk menilai umpan balik (*feedback*) dan evaluasi.
4. Mengevaluasi secara mendalam solusi alternatif yang ditawarkan, baik dalam hal kelayakan teknis, efektivitas biaya, dampak yang mungkin terjadi pada kelompok masyarakat, maupun tingkat penerimaan politik, dan seterusnya.

Perencanaan wilayah adalah perencanaan yang diterapkan pada suatu wilayah, dengan demikian, pembahasan selanjutnya adalah mengenai wilayah. Pengertian pertama yang harus ditanamkan dalam mendefinisikan wilayah adalah : “wilayah adalah ruang”. Mengenai “ruang” ini ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan subjektif dan objektif. Pandangan subjektif menyatakan penentuan wilayah sebagai cara membagi ruang untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan wilayah adalah suatu metode klasifikasi untuk menyusun

pengelompokan ruang. Wilayah dipandang sebagai sebagai suatu kesatuan yang pasti, suatu organisme yang dapat diidentifikasi dan dipetakan. Pandangan subjektif ini merupakan pandangan yang sekarang banyak dianut. Saat ini pandangan objektif ini pernah populer pada awal abad ke-20 dan berkaitan dengan usaha untuk menentukan wilayah secara alamiah (Nurzaman, 2012).

2.2 Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah adalah pemecahan Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah (Rozali Abdullah, 2005).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.129 Tahun 2000 mengatur tentang tujuan pembentukan daerah yang tercantum dalam bab II pasal 2 sebagai berikut: Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah

- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Percepatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 di jelaskan bahwa pemekaran wilayah harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Syarat Administratif

Syarat administratif pembentukan Kabupaten meliputi adanya persetujuan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati atau Walikota yang beresngkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

2. Syarat Teknis

Meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

3. Syarat Fisik Kewilayahan

Syarat kewilayahan meliputi:

- a. Untuk pembentukan Provinsi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten
- b. Untuk pembentukan Kabupaten paling sedikit 5 (lima) Kecamatan
- c. Untuk pembentukan Kota paling sedikit 4 (empat) Kecamatan.

2.2.1. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1) bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya pada pasal 18 B ayat (2) tercantum kalimat sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Namun sebelumnya pemekaran wilayah ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus dalam bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus, yang kemudian undang-undang tersebut telah diperbarui dengan UU No.23 Tahun 2014 bab VI bagian II tentang Pembentukan Daerah.

2.3. Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan wilayah merupakan fenomena universal. Di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya, disparitas pembangunan merupakan masalah pembangunan antar-wilayah yang tidak merata. Pada banyak negara, pembagian ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah-masalah politik. Hampir di semua negara, baik pada sistem perekonomian pasar maupun ekonomi terencana secara terpusat, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparitas antarwilayah (Sjafrizal, 2008).

Dalam skala nasional, proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan masalah pembangunan yang cukup besar dan kompleks. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan-kesenjangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah *hinterland* mengalami pengurangan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antar wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dan sebagainya.

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai sebagai bangsa. Ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah/ kawasan di satu sisi terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi. Di sisi lain, potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antarwilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah/kawasan *hinterland* menjadi lemah karena pengurangan sumberdaya yang berlebihan (*backwash*), yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah tertuju ke pusat-pusat pembangunan secara masif dan berlebihan sehingga terjadi akumulasi nilai tambah di kawasan-kawasan pusat pertumbuhan.

Ketidakseimbangan pembangunan inter-regional, di samping menyebabkan kapasitas pembangunan regional yang sub-optimal, pada gilirannya juga menihilkan potensi-potensi pertumbuhan pembangunan agregat makro dari adanya interaksi pembangunan inter-regional yang sinergis atau saling memperkuat. (Kuncoro, 2004).

Menyadari terjadinya ketidakseimbangan pembangunan inter-regional, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan wilayah/kawasan. Pada awalnya, strategi program-program pengembangan kawasan lebih didasarkan atas strategi dari sisi pasokan (*supply-side strategy*), yakni berupa upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas kawasan.

Menurut Sjafrizal (2012:117) terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, yaitu :

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang lebih tinggi pada suatu negara.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan yaitu meliputi perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja

yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi pada negara sedang berkembang dimana mobilitas barang dan jasa kurang lancar dan masih terdapatnya beberapa daerah yang terisolir.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara, dan bahan mineral lainnya. Disamping itu terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut dengan pertumbuhan kegiatan pertanian. *Kedua*, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat

pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi, sebaliknya jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah.

Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk ke dalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di

daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dari daerah pedesaan. (Sjafrizal, 2008).

Kesenjangan antarwilayah juga bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia dan beberapa negara lainnya yang lebih menekankan pertumbuhan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan telah menimbulkan kesenjangan antarwilayah yang luar biasa. *Trickle down effect* yang diharapkan secara efektif tidak terjadi, namun dalam kenyataannya malah digantikan oleh *backwash effect*, yaitu pengurasan sumberdaya secara berlebihan dari wilayah *hinterland*.

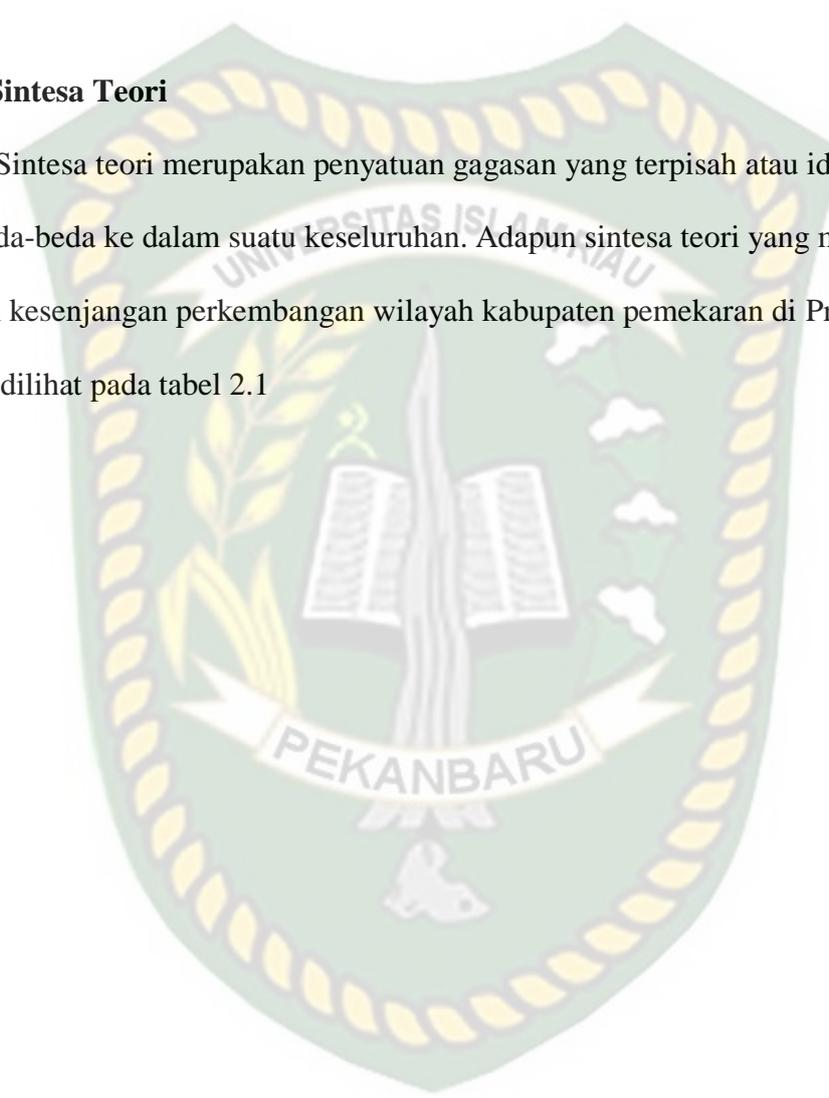
Ketidak efisienan di bidang administrasi juga dapat menyebabkan terjadinya disparitas antarwilayah. Wilayah-wilayah yang ingin maju harus mempunyai administrator yang jujur, terpelajar, terlatih, dan sistem administrasi yang efisien. Wilayah-wilayah yang administrasinya efisien akan akan mampu mengundang investasi, karena perijinannya tidak terlalu rumit. Sebaliknya daerah dengan kinerja administrasi buruk tidak diminati investor. Hal itulah menjadi salah satu alasan mengapa para investor kurang terdorong untuk menanamkan investasinya di daerah-daerah di indonesia, yaitu karena perijinannya yang terlalu rumit dan berbelit-belit.

Pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan antara berbagai daerah dalam suatu wilayah yang akan

menyebabkan ketimpangan tingkat pendapatan per kapita daerah. Untuk menghitung ketimpangan regional digunakan Indeks Ketimpangan Entropi Theil (Kuncoro, 2004).

2.4. Sintesa Teori

Sintesa teori merupakan penyatuan gagasan yang terpisah atau ideologi yang berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan. Adapun sintesa teori yang meliputi kajian kesenjangan perkembangan wilayah kabupaten pemekaran di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.1



Tabel 2.1. Sintesa Teori

Tinjauan Pustaka	Sumber	Uraian	Sintesa
Definisi Wilayah	Nurzaman, (2012) Saefulhakim, Dkk, (2002)	Wilayah dipandang sebagai suatu kesatuan yang pasti, suatu organisme yang dapat diidentifikasi dan dipetakan.	Sebagai dasar pemahaman untuk mengkaji tingkat perkembangan wilayah.
Pemekaran Wilayah	Rozali Abdullah, (2005)	Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih	Sebagai dasar pemahaman untuk mengkaji tingkat perkembangan wilayah.
Kesenjangan Wilayah	Sjafrizal, (2008) Kuncoro, (2004) Ying, (2000)	Kesenjangan merupakan masalah pembangunan antar wilayah yang tidak merata di semua negara ataupun daerah, pembagian ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah-masalah sosial politik.	Sebagai dasar pemahaman untuk mengkaji tingkat kesenjangan perkembangan wilayah.

Sumber: Identifikasi Penulis Tahun 2017

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu syarat mutlak keabsahan suatu karya ilmiah yang dapat ditinjau dari ide dasar penelitian dan perbandingan penelitian dengan penelitian sejenis. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat melalui beberapa kajian hasil studi yang ada sebelumnya pada tabel 2.2



Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodelogi Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian	Daerah Penelitian
Widi Asih (2015)	Analisis ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan	Mengetahui perkembangan kemajuan perekonomian tiap kecamatan pada periode 2004-2013.	Metodelogi yang dipakai adalah metode Deskriptif dan Kuantitatif yaitu melalui teknik analisis matrik Tipologi Klassen dan analisis regresi data panel	Mengetahui Perhitungan yang menunjukkan besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi di dalam kecamatan	Kabupaten Cilacap
Barika (2012)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota	Mengetahui besarnya tingkat ketimpangan regional antar kabupaten dan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan	Metodelogi yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif yaitu analisis Tipologi Klassen dan Analisis	Mengetahui perbedaan angka ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan data yang	Provinsi Bengkulu

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodelogi Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian	Daerah Penelitian
		indeks Williamson dan Indeks ketimpangan entropi theil.	Ketimpangan regional (Williamson & Entropi theil)	berbeda	
Caska, R.M Riadi (2005)	Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Provinsi Riau	Mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Riau	Metodologi yang digunakan adalah menggunakan metode analisis Tipologi Klassen, analisis ketimpangan ekonomi antar daerah yaitu Williamson & Entropi theil, dan analisis Kurva U terbalik oleh Kuznets	Mengetahui klasifikasi daerah yang didasarkan oleh dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau PDRB	Provinsi Riau
Meylan Indriawati (2015)	Analisis Ketimpangan Pembangunan antar	Mengetahui besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah	Metodolgi yang digunakan adalah analisis indeks Williamson, analisis indeks	Mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi	Daerah Istimewa Yogyakarta

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodelogi Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian	Daerah Penelitian
	Kabupaten/Kota	Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004-2013 berdasarkan analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil	Entropi theil, analisis Tipologi Klassen, dan analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	antar Kabupaten/Kota dan mengklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi.	

Sumber: Identifikasi Penulis Tahun 2017

